

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menggambarkan permasalahan pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berupaya dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Permasalahan kemiskinan sangat area dan upaya penanggulangannya harus dicoba secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah menyadari jika kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya tergantung kepada kebijakan ekonomi makro saja. Kebijakan ekonomi mikro terlebih kebijakan ekonomi sosial mesti dicoba bersama- sama dengan kebijakan ekonomi makro buat menanggulangi kemiskinan.

Kemiskinan pula jadi salah satu ukuran paling utama buat mengidentifikasi jenjang kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkatan kemiskinan di suatu wilayah biasanya digunakan buat mengukur jenjang kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan jadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berlandaskan pergantian pada jenjang kemiskinan.

Pemicu lain dari besarnya kemiskinan di pedesaan merupakan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di wilayah perkotaan dari pada wilayah pedesaan, ialah salah satu aspek pemicu wilayah pedesaan terus menjadi tertinggal serta kemiskinan structural terus menjadi meningkat di wilayah

pedesaan. Realitas membuktikan kalau sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, hingga pembangunan pedesaan selaku bagian dari pembangunan nasional wajib menemukan prioritas utama. Konsep ini ialah upaya penanggulangan kemiskinan yang menempatkan daerah pedesaan selaku prioritas dalam kenaikan perkembangan ekonomi.

Kabar Formal Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016 jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 di Indonesia menggapai 28, 01 juta jiwa ataupun sebesar 10, 86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jawa Tengah ialah salah satu wilayah yang memiliki tingkatan kemiskinan yang besar di Indonesia. Apalagi pada tahun 2016, Propinsi Jawa Tengah peringkat 1 propinsi termiskin di Jawa serta Bali. Perihal ini bisa dilihat pada informasi BPS yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2016

Propinsi	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
DKI Jakarta	3.75	0	3.75
Jawa Barat	7.55	11.72	8.77
Jawa Tengah	11.38	14.88	13.19
DI Yogyakarta	11.68	16.27	13.10
Jawa Timur	7.91	15.83	11.85
Banten	4.49	7.32	5.36
Bali	3.53	5.21	4.15

Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>

Bersumber pada Tabel 1 di atas, nampak kalau Posisi Jawa Timur memiliki prosentase kemiskinan terbanyak no 3 sehabis Jawa Tengah serta DI Yogyakarta ialah pada angka 13, 19% serta setelah itu disusul dengan DIY dengan angka 13, 10%. Sebaliknya prosentase angka kemiskinan terkecil merupakan DKI Jakarta ialah sebesar 3, 75%. Distribusi angka kemiskinan seluruhnya lebih besar di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan.

Informasi Tubuh Pusat Statistik memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan menggapai angka 125, 76 ribu orang. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin menggapai 135, 74. Dari informasi tersebut nampak bahwasannya terjalin penyusutan jumlah penduduk miskin sebesar 9, 98 ribu orang. Bila dalam presentase kemiskinan, Kabupaten Pasuruan hadapi penyusutan 0. 69%. Tetapi perkara kemiskinan bukan cuma hanya jumlah serta presentase penduduk miskin. Tetapi di sisi lain pula membutuhkan suatu atensi, semacam kedalaman serta keparahan dari kemiskinan. Kedua indeks tersebut menarangkan tentang dimensi rata- rata kesenjangan pengeluaran dan cerminan menimpa penyebaran pengeluaran. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2017 merupakan 3, 36. Sebaliknya pada tahun 2018 hadapi peningkatan jadi 3, 84. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2017 merupakan 0, 79. Sebaliknya dalam tahun 2018 hadapi peningkatan jadi 1, 16(BPS Gunungkidul, 2018).

Upaya pengentasan kemiskinan secara nasional sudah dicoba dalam bermacam pendekatan, ada 3 arah kebijaksanaan, ialah kebijaksanaan tidak langsung buat menghasilkan keadaan yang kondusif, kebijaksanaan langsung yang diperuntukan

kepada warga miskin serta kebijaksanaan spesial buat memperluas upaya penanggulangan kemiskinan. Bersumber pada pendekatan tersebut, kebijakan otonomi desa lewat Undang- Undang Desa Tahun 2014 ialah upaya nasional yang antara lain diperuntukan buat memesatkan pembangunan desa serta tingkatkan kesejahteraan desa lewat pengentasan kemiskinan.

Otonomi desa yang bergulir semenjak diterapkannya Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa membagikan kekuatan besar untuk desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya ataupun dalam mengelola kemampuan yang dimilikinya. Salah satu kewenangan berarti yang dipunyai desa merupakan kewenangan mengelola kekayaan serta kemampuan desa buat pembangunan, pengembangan dan kesejahteraan warga. Pasal 87 dari Undang- Undang Desa mengatakan kalau Desa bisa mendirikan Tubuh Usaha Kepunyaan Desa yang diucap BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. BUMDes bisa melaksanakan usaha di bidang ekonomi serta/ ataupun pelayanan universal cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan. Uraian pasal tersebut menarangkan kalau BUMDes dibangun oleh Pemerintah Desa buat mendayagunakan seluruh kemampuan ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan kemampuan sumber energi alam serta sumber energi manusia dalam rangka tingkatkan kesejahteraan warga Desa. BUMDes dalam kegiatannya tidak cuma berorientasi pada keuntungan keuangan, namun pula berorientasi buat menunjang kenaikan kesejahteraan warga Desa.

Bagi Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa melaporkan BUMDes merupakan tubuh usaha yang segala ataupun sebagian besar modalnya dipunyai oleh Desa lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola peninggalan, jasa pelayanan, serta usaha yang lain buat sebesar- besarnya kesejahteraan warga desa. Penafsiran tersebut membagikan uraian kalau tujuan utama dari BUMDes merupakan kesejahteraan warga desa. Penafsiran lain melaporkan BUMDes merupakan tubuh usaha kepunyaan desa yang didirikan atas dasar kebutuhan serta kemampuan desa selaku upaya kenaikan kesejahteraan warga yang didirikan atas prakarsa serta partisipasi warga desa secara keseluruhan, bukan sebagian.

BUMDes pada dasarnya ialah upaya pemerintah yang berlandaskan pada prinsip- prinsip pemberdayaan serta desentralisasi. Kerangka otonomi desa tercantum prinsip desentralisasi dengan membagikan kewenangan kepada desa buat mengelola potensinya secara mandiri. Prinsip pemberdayaan ialah suatu proses pembangunan yang manekankan pada pemberian kekuatan, keahlian serta kewenangan kepada warga buat turut dalam proses pembangunan tersebut. Target pemberdayaan antara lain merupakan membebaskan warga dari belenggu kemiskinan, ketergantungan serta keterbelakangan, setelah itu menguatkan posisi warga miskin serta tidak berdaya dalam stuktur sosial, ekonomi serta kekuasaan.

Tujuan utama pemberdayaan warga lewat pengelolaan BUMDes tidak lain merupakan masyarakat desa yang mandiri. Kemandirian desa bisa dilihat dari sebagian bidang, antara lain kemandirian material(ekonomi, kemandirian intelektual(keahlian

membongkar permasalahan) serta keahlian organisasi. Desa yang mandiri memiliki karakteristik selaku desa yang sanggup penuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak bergantung pihak manapun. Masyarakatnya sanggup melaksanakan kerjasama yang baik, kemampuan, keahlian dan semangat yang baik dalam membangun desa. Desa mandiri sanggup menggunakan kemampuan yang dipunyai desanya jadi sumberdaya yang mensejahterakan.

Salah satu bentuk dorongan pembangunan ekonomi pada sekup desa ialah pemberian kewenangan dari pihak pemerintah biar mengelola secara mandiri pemerintahannya dan lembaga ekonomi yang terdapat pada tingkatan desa. Lembaga ekonomi tersebut salah satunya ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebutuhan dan keahlian desa jadi sesuatu dasar pendirian dari BUMDes yang bertujuan buat tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya bumdes tersebut dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Pembuatan BUMDes pula mempunyai tujuan buat mengembangkan kegiatan sesuai dengan adat dan budaya, serta kegiatan maupun program dari pemerintah dan yang lain yang mana dapat menaikkan pemasukan penduduk. Tidak cuma itu keberadaan BUMDes dan menggerakkan keahlian desa serta pengentasan kemiskinan.

Desa Jatisari ialah desa di Kabupaten Pasuruan yang mendirikan BUMDes dengan tujuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes tersebut di dirikan dari tahun 2012 tetapi buat pada 2017 BUMDes tersebut baru beroperasi. BUMDes Jatisari tersebut merupakan salah satu BUMDes yang sukses pada Kabupaten Pasuruan. BUMDes Jatisari lewat programnya dari zona pariwisata sanggup kurangi

angka pengangguran pada umur produktif. Dengan kata lain warga serta pemuda desa menemukan pemberdayaan dengan jadi karyawan pada BUMDes Jatisari tersebut pada sector pariwisata. Pemberdayaan yang dicoba oleh BUMDes Jatisari bukan cuma pada sector pariwisata saja. Tetapi pula pada sector perkebunan serta pengolahan hasil kebun, semacam olahan pisang dari tumbuhan pisang yang ditanam sendiri. Dari berita desa 27 Januari 2017 melaporkan kalau desa wisata yang dikelola oleh BUMDes Jatisari tersebut memperoleh gelar desa wisata terbaik seKecamatan Purwodadi. Perihal ini bersumber pada kalau BUMDes Jatisari sanggup mengembangkan kemampuan wisata dan membangaun kesejahteraan warga lewat pola pengembangan wisata berbasis partisipasi warga.

Bersumber pada penjelasan di atas, periset tertarik buat memandang lebih jauh BUMDes Jatisari ini, gimana kedudukannya dalam pemberdayaan warga desa sebab pengelolaan BUMDes menggunakan serta memaksimalkan kemampuan warga serta alam. Alibi kenapa tema ini berarti untuk periset sebab BUMDes Jatisari tersebut sudah teruji sudah sukses mengelola BUMDes dengan hasil yang lumayan besar. Pengelolaan BUMDes di Desa Jatisari sanggup memberdayakan warga desa buat berpartisipasi dalam pembangunan desa serta kenaikan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu periset bermaksud buat melaksanakan riset dengan Judul “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Terhadap Pembangunan Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dalam Prespektif Islam”.

Pengukuran pembangunan dalam Islam mempunyai 3 ukuran: pengembangan diri orang yang diucap *rushd*, pengembangan raga bumi yang diucap *istimar*, serta

pengembangan kolektivitas manusia, yang mencakup keduanya. Yang awal memastikan proses dinamis dalam perkembangan orang mengarah kesempurnaan. Yang kedua memastikan pemanfaatan sumber energi alam buat meningkatkan bumi buat penuh kebutuhan material orang serta segala umat manusia. Konsep ketiga mengacu pada kemajuan kolektivitas manusia mengarah integrasi penuh serta persatuan. Yang mendasar untuk ketiganya merupakan kepercayaan kalau Maha Pencipta sudah sediakan metode serta fasilitas buat memfasilitasi pencapaian ketiga ukuran pembangunan.

Dari konsep pengukuran pembangunan diatas, ada 3 ukuran yang hendak digunakan dalam riset ini. Riset ini hendak berupaya buat menganalisis pembangunan manusia serta ekonomi prespektif islam yang dihasilkan oleh BUMDes Jatisari terhadap warga di desa Jatisari, bersumber pada ukuran *rushd*, *isti' mar* serta *development of the human collectivity*.

Alibi teori tersebut dikira sesuai disebabkan riset ini mau mengenali kedudukan BUMDes dalam pembangunan dengan perspektif Islam. Meski dengan hambatan Desa Jatisari yang mempunyai bermacam berbagai keyakinan yang dianut oleh mayarakat Desa Jatisari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran badan usaha milik desa Jatisari terhadap pembangunan desa dengan perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan usaha milik desa Jatisari terhadap pembangunan desa dengan perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Berikut beberapa yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengembangan teori tentang manajemen risiko pengelolaan dana wakaf uang terutama pada lembaga yang menjadi referensi dalam dunia akademis.

2. Secara Praktis

Bagi BUMDes Jatisari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Buat memudahkan penulis dalam menganalisa serta menulis riset ini, hingga penulis menarangkan sistematika penyusunan dalam proposal riset secara garis besar. Secara garis besar riset ini terdiri dari 5 bab yang dipecah dalam sub bab, yang dimana tiap sub bab memiliki batas tiap- tiap serta silih berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang yang lain. Ada pula sistematika penullisannya selaku berikut:

BAB I tentang Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menguraikan menimpa latar balik permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta khasiat riset, tata cara riset serta sistematika penyusunan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini hendak menguraikan tentang jajak pustaka, kerangka teori yang berkaitan dengan ulasan riset.

BAB III tentang Tata cara Riset. Dalam bab ini penulis menguraikan menimpa tata cara pengumpulan informasi dalam riset yang dicoba. dalam bab ini pula mangulas tentang pengumpulan informasi, batas riset serta posisi riset.

BAB IV tentang Hasil Riset serta Ulasan. Pada bab ini penulis menguraikan cerminan universal dan pemaparan sebagian informasi yang didapat serta dianalisa oleh penulis. Hasil dari analisis setelah itu dideskripsikan berbentuk narasi sehingga gampang buat dipahami oleh tiap orang yang membaca riset ini. Pada BAB ini pula hendak dibahas hasil dari riset yang terdapat dengan metode menkomparasikan hasil yang diperoleh dengan riset lain yang seragam.

BAB V tentang Penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta anjuran. Kesimpulan bisa dihasilkan dari ulasan yang sudah dicoba, serta anjuran yang berisi tentang anjuran buat riset berikutnya.